

ABSTRAK

AKHMAD SAMARGA. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Provinsi Banten* (dibimbing oleh Tatag Wiranto) .

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Banten. Hasil pengamatan menunjukkan urutan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah bagi Jawa dan Bali. Masalah ini, disebabkan oleh faktor implementasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh instansi terkait belum maksimal. Implementasi difokuskan pada komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian para pelaksana atau staf pelaksana implementasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengisian kuesioner dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis distribusi frekuensi dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia ditentukan secara signifikan oleh faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Dari keempat faktor tersebut komunikasi antar elemen pelaksana terkait merupakan hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Banten.

Dalam upaya meningkatkan dukungan faktor komunikasi pada implementasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia, sebaiknya faktor komunikasi lebih ditingkatkan dengan memperhatikan struktur pimpinan atau pejabat yang berbeda tingkat jabatan, perilaku, dan bahasa yang digunakan.

Implementasi kebijakan perlu ditetapkan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya antara lain: (1). SKPD dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. (2). SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD. (3). Dalam rangka sinkronisasi program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD, setiap SKPD berkewajiban melakukan koordinasi dan konsolidasi agar terjadi keselarasan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program sesuai dengan target-target pencapaiannya yang telah ditetapkan.

Kata kunci : implementasi kebijakan. pembangunan sumber daya manusia. provinsi Banten.

ABSTRACT

AKHMAD SAMARGA: *Implementation of Human Resource Development Policy in the Province of Banten* (supervised by Tatag Wiranto).

This research reviewed the implementation of human resource development policy in the province of Banten. The observation showed the lowest Human Development Index (HDI) is in province of Java and Bali. This is because of implementation of human resource development policy factor by the related institutions has not been optimally conducted. The implementation was focused on communication, resources, disposition/attitude, and bureaucratic structure. This research used a descriptive-qualitative approach, using staff or agent of policy implementation as research subject. Data collection method was done by means of interviews, questionnaires and observations. Data analysis use frequency distribution analysis and multiple linear regression analysis. The results showed that the implementation of human resource development policy was determined significantly by several factors: communication, resources, disposition/attitude, and bureaucratic structure. Among the four factors, communication is a very important factor in the success of implementation of the policy of human resource development in the province of Banten. In an effort to improve communication factor support on the implementation of human resource development policy, communication factor should be improved more by taking into account the structure of the leadership or officials of different levels of positions, behavior, and language used. In the implementation of policy, it needed to set the rules in its implementation, among others: (1) SKPD and society including the business world is obliged to implement programs in RPJMD consistently, honestly, transparently, participatory and accountably. (2) SKPD obliged to ensure consistency between RPJMD and the plans of SKPD. (3) In order to synchronize the programs that have been established in RPJMD, any SKPD obliged to do coordination and consolidation in order to occur harmony and continuity in the implementation of the program, in accordance with the targets that have been set

Keyword: policy implementation. human resource development.
the province of Banten.